

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Hukum Harta Kekayaan, Bandung : PT. Cipta Atitya, 1994.
- Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2, No.2, (Juli, 2013)
- Abdul Manan, *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama, Mimbar Hukum*, Mimbar Hukum, No. 33 Tahun 1997.
- Abdul Mannan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, 1998
- Agusta Ivanovih, “Analisis Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif”.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Angga Budi Saputro, “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2018)”, Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2018.
- Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, “Panduan Praktis Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Graha, 2014).
- Anis Fuad, “Panduan Praktis Penelitian Kualitatif”
- Ary Kristiyana, “Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI FBS UNY”, Diksi, Vol.;; (22 September 2014)
- Bab VI Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusannya Bagian 1 Pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Bab VII Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 poin 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- Bobby Briando, “Prothecal Law: Membangun hukum berkeadilan dengan kedamaian”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (1) (September, 2017)
- Damanhuri Fattah, "Implementasi Nilai Keadilan Dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 5, No. 2 (Juli, 2011)
- Diakses tanggal 1 juni 2023 jam 10.10 PM. <https://aa-lawoffice.com/gugatan-harta-bersama/>

Diakses tanggal 14 Oct 2022 jam 18.00. <http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id/kepegawaian/2019/05/15/perbedaan-prinsipantarapemohonandengangugatan/#:~:text=Pengertian%20gugatan%20adalah%20permasalahan%20perdata,menggugat%20pihak%20lain%20sebagai%20tergugat.>

diakses tanggal 15-11-2021 <https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-231>

Edwin W. Patterson, "Hans Kelsen and His Teory of Law", California Law Review, 40, 1952.

Ekky Maria Farida Sani, "Pemanfaatan Buletin Pustakawan Oleh Pustakawan di Semarang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Volume 2. Nomr 3, (Tahun 2013)

Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi offset, 2010).

Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 1 Februari 2013

Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *De Jure*, Vol. 17 No. 4 desember 2017.

Fahmi Fauzi Rahman "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Pandeglang (Studi Putusan No. 964/Pdt.G/2016/PA. Pdlg)", Skripsi, Tidak Diterbitkan, 2020.

Faizal Liky, 2015, *harta bersama dalam perkawinan*, ijtima' iya, fol.8.

Farida Sani Ekky Maria, "Pemanfaatan Buletin Pustakawan Oleh Pustakawan di Semarang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Volume 2. Nomr 3, (Tahun 2013).

Filsafat Hukum, I Dewe Gede Atmaja: Dimensi Tematis dan Historis, Setara Press, Malang, 2013

Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Betham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer", *HUMANIORA*, Vol. 3, 1 (April, 2012).

Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (Theory of Justice): Kajian dalam Persepektif Hukum Islam dan Barat," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vo. 01, No. 01, (Jaunari-Juni, 2018)

FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif*, 2, 1 (April, 2019)

- Gege Agus Udayana, I Nyoman Surata, “*Peran Saksi dalam Perkara Perceraian Di pengadilan Negeri Singaraja*”, *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 1 Agustus , 2018.
- Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, 1999.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis Untuk Menwujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Terj. Nurulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2014).
- Hans Kelsen, *General Theory of law and state*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Raisul Muttaqie, 7; *Introduction to The Problem of Legal Theory*, Terj. Siwi Puwandari, (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*.
- Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2014)
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974*, Tirta Mas, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, “*Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, (Jakarta: Kenacana, 2016)
- Ibnu Taimiyah banyak mengomentari tentang konsep keadilan berdasarkan Al-Qur’an, terutama dalam keadilan hukum pasar. Dalam kitab *al-Hisbah*, Ia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang adil dan tidak adil meskipun tolak ukur keadilan menurutnya adalah harga yang “setara” sebagai harga yang adil. Abû al-Abbâs Taqiyuddîn Ibnu Taimîyah, *al-Hisbah fî al-Islâm* „aw *Wazifât al-Hukûmah al-Islâmîyah*, Dâr al-Kutub al-„Arabîyah, Damaskus, 1967
- Isnaeni Mukarromah, “Pembagian Harta Bersama dengan Harta Bawaan Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt)” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018
- Ivanovih Agustin, “*Analisis Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*”
- Jalâl al-din al-Suyûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir fî Qawâ'id wa Furû' alFiqh al-Syâfi'î*, (al-Qâhirah: Isa al-Bâbi al-Halabi, t.th)

- Jimly Assiddiqie dan M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007),
- Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, Medan, USU, 2016411
- Kelik Wardianto and Khudzaifah Dimiyati, "Basis Epistemologis Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Sebuah Deskripsi Tentang Asumsi-Asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans Kelsen", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3 (September, 2014)
- KHI pasal 86-87.
- Laila M.Rasyid SH, M.HUM Pengantar Hukum Acara Perdata, hal 31.
- Lisa Elisabeth Barahamin, "Pelaksanaan Sita Marital dalam Perkara Perceraian", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 4, Juni 2017
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)
- M.Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan abstraksi hukum islam" dalam Cik Hasan Bisri, Ed; *Kompilasi hukum islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*, Jakarta: logos wacana ilmu, 1999.
- Machmud Syahrul, "*Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Mesraini, *Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII No.1 Januari 2012
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Mily Sari, dan Asmendri, "*Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*", Volume 6 (I), 2020
- Mista Zed, "*Metode penelitian Kepustakaan*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 14. NO. 2, (Desember, 2015)

Muhammad Luthfi, “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Progresif Satjipto Rahardjo” (Tesis, UIN Malang, 2018)

Muhammad Nafi, “Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara No 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb)” (Jurnal Hadratul Madaniyah, Juni 2020)

Muhammad Tigas Pradoto, *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2014

Mukhlisin dan Sarip, “Keadilan dan Kepastina Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Persepktif “Al-Adl” dalam Al-Quran”, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 1 (April 2020)

Pasal 10 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”

Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg Hukum Acara Perdata menyatakan “(1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka. (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasan”

Pasal 174, Het Herziene Indonesisch Reglement.

Pasal 227 ayat (1), Het Herziene Indonesisch Reglement.

Pasal 3, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*

pasal 35 ayat (1), Bab VII No. 1 Tahun 1974 “tentang Harta Benda Dalam Perkawinan”

Pasal 35 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974, Bab VII *Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan*.

Pasal 84, Undang-Undang No 7 Tahun 1989, *Tentang Pengadilan Agama*,

Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989, *Tentang Peradilan Agama*.

Pasal 97, Kompilasi Hukum Islam, Bab XIII *Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” dalam Hazairin, *Tinjauan Mengenai U.U Perkawinan Nomor: 1-1974*, Jakarta: Tintamas, 1986.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, cet. Ke VIII.

Putusan No. 1821/Pdt.G/2019/PA.BL “*Tentang Jawaban Tergugat*”

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.BL, *Tentang Duduk Perkara*,

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.BL, *Tentang pokok perkara*

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.BL, *Tentang Pertimbangan Hakim*.

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1406/Pdt.G/2022/PA.BL, *Tentang Mengadili*

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 1821/pdt.G/2019/PA.BL, *dalam eksepsi*

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 1821/pdt.G/2019/PA.BL, *pertimbangan hakim dalam konvensi dan rekonvensi*.

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 1821/pdt.G/2019/PA.BL, *tentang duduk perkata*,

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 1821/pdt.G/2019/PA.BL, *tentang alat bukti dan saksi*

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 1821/pdt.G/2019/PA.BL, *tentang gugatan Rekonvensi*

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 1821/pdt.G/2019/PA.BL, *tentang pertimbangan hakim*

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 1821/pdt.G/2019/PA.BL, *tentang mengadili*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *Dalam Rekonvensi/Tergugat mengajukan Gugatan Balik*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *Jawaban Tergugat Rekonvensi Tentang Perubahan Gugatan, Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *tentang Duduk Perkara*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *tentang Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *tentang Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *Tentang Jawaban Tergugat Rekonvensi, i Dalam Eksepsi*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *Tentang Jawaban Tergugat Rekonvensi, Dalam Pokok Perkara*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Pokok Perkara*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *Tentang Pertimbangan Hakim Terkait keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Kebebasan Dalam Memberikan Putusan*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Konvensi dan Rekonvensi*

Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 1361/Pdt.G/2022/PA.Ngw, *Tentang Amar Putusan/Mengadili*

Rasjid Sulaiman, “*Fiqih Islam*”, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014).

Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah* Bairut Libanon: Darul Fikr, Cet kedua, 1998. Juz 3

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI. Press. Ke V, 1986

SEMA Kamar Agama Nomor 10 Tahun 2020

SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

- Siah Khosyi'ah, Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim Di Indonesia, *Al Manahij*, Vol. Xi No. 1, Juni 2017
- Sinaga Ali Imran, "*Fikih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah*", (Bandung: CitaPUSTAKA Media Perintis, 2011).
- Siti Nur Aisyah "*Tesis Analisis Putusan Hakim Tentang Percampuran Harta Bawaaan Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan John B. Rawls*" hal 25
- Sudikno Metokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008)
- Sufirman Rahman, Nurul Qamar, Muhammad Kamran, "*Efektifitas Pembagia Harta Bersama Pasca Perceraian*", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Maret 2020).
- Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* , (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Taufik Abdullah, "*Putusan Verstek Pengadilan Agama pada Cerai Talak Prespektif Keadilan Gender*", Vol. 11. (No 2 Juni 2018).
- Terj. Siwi Puwandari *Introduction to The Problem of Legal Theory*, (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Turmuzi, "*Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat Tahun 2015-2018*" (Tesis, UIN Mataram, 2018)
- Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Bab VII, tentang Harta Benda Dalam Perkawinan.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta, 1974.
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, 1999
- Zahrowati, "*Nilai Keadilan dalam Putusan Pembagian Harta Bersama pada Peradilan Agama*" (Disertasi, Universitas Hasanudin, 2017)